

Pemetaan Arah Riset Global tentang Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial: Implikasinya bagi Kebijakan Nasional

Mapping Global Research on Poverty and Welfare: Toward National Policy Reform

Ghina Fitri Azizah,¹ Rully Khairul Anwar,² & Yunus Winoto³

¹ghina22001@mail.unpad.ac.id (corresponding author)
Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

²rully.khairul@unpad.ac.id
Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

³yunus.winoto@unpad.ac.id
Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

Received: December 30, 2024 | Revised: Februari 5, 2025 | Published: June 30, 2025

Abstract: Poverty and social inequality are multidimensional global issues that require serious attention. Despite attracting widespread concern, poverty alleviation policies often remain insufficiently grounded in comprehensive scientific evidence. In this context, understanding the direction and trends of global research on poverty and social welfare is crucial to inform the development of more effective, responsive, and context-sensitive policies. This study aims to map and analyze global research trends in this field while evaluating Indonesia's position and contributions within international academic discourse. This study is quantitative with bibliometric methods and analyzes 108 scientific articles indexing in Scopus to trace collaboration patterns, citations, and thematic developments in global research on poverty and social welfare. The findings indicate that Indonesia holds significant influence in global literature, reflected in high citation counts and notable interdisciplinary collaboration compared to other countries. However, the dominant research themes remain general and rarely reflect specific challenges, such as regional disparities and restricted access to basic services. These findings highlight the urgent need to strengthen Indonesia's national research contributions in ways that are more contextually relevant to social policy development. Accordingly, stakeholders are encouraged to reinforce evidence-based policymaking, enhance research partnerships, and prioritize programs to address socio-economic inequality. In this regard, the Indonesian House of Representatives (DPR RI) is expected to strengthen its three core functions through research-based approaches and prioritize sustainable social policies that support marginalized and vulnerable groups.

Keywords: bibliometrics; evidence-based policy; poverty; public policy; research trends; social welfare



Abstrak: Kemiskinan dan ketimpangan sosial merupakan isu global multidimensi yang memerlukan perhatian serius. Meskipun telah menjadi perhatian banyak pihak, kebijakan pengentasannya sering kali belum sepenuhnya berbasis pada bukti ilmiah yang komprehensif. Dalam konteks ini, memahami arah dan tren riset global mengenai kemiskinan dan kesejahteraan sosial menjadi krusial sebagai pijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif, responsif, dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis tren riset global di bidang tersebut, serta mengevaluasi posisi dan kontribusi Indonesia dalam diskursus akademik internasional. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode bibliometrik dan menganalisis 108 artikel ilmiah terindeks Scopus untuk menelusuri pola kolaborasi, kutipan, dan perkembangan tema dalam riset global terkait isu kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pengaruh signifikan dalam literatur global, dengan jumlah sitasi yang tinggi dan kolaborasi interdisiplin yang menonjol dibandingkan dengan negara lain. Namun, tema riset yang berkembang masih bersifat umum dan belum banyak mencerminkan tantangan spesifik, seperti ketimpangan wilayah dan keterbatasan akses layanan dasar. Temuan ini menegaskan urgensi penguatan kontribusi nasional dalam riset yang lebih kontekstual dan relevan terhadap kebutuhan kebijakan sosial. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar para pemangku kepentingan memperkuat kebijakan berbasis data, meningkatkan kemitraan riset, dan memprioritaskan program pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi. Dalam hal ini, DPR RI perlu memperkuat ketiga fungsi utamanya berbasis riset, serta memprioritaskan kebijakan sosial yang berkelanjutan, dan berpihak pada kelompok rentan.

Kata kunci: bibliometrik; kebijakan berbasis bukti; kebijakan publik; kemiskinan; kesejahteraan sosial; tren riset

Pendahuluan

Kemiskinan dan kesejahteraan sosial merupakan isu global yang terus menjadi perhatian utama, termasuk di Indonesia. Meskipun persentase kemiskinan menurun, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar masih menjadi persoalan utama. Hal ini menegaskan bahwa upaya untuk mengurangi kemiskinan dan membangun kesejahteraan sosial yang merata masih menghadapi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi (Badan Pusat Statistik, 2024, p. 104). Selain itu ketidaksetaraan sosial yang dipicu oleh dinamika pasar bebas dapat memperburuk kondisi kemiskinan dan menyebabkan siklus ketimpangan antar-generasi yang sulit diputus (Pechdin *et al.*, 2023, p. 1). Watif *et al.* (2024, pp. 536–539) juga menyoroti bahwa sebagian masyarakat di wilayah perkotaan tetap menghadapi keterbatasan akses terhadap peluang dan sumber daya akibat ketimpangan ekonomi, urbanisasi yang cepat, dan kesenjangan pendidikan. Kondisi ini menggambarkan kompleksitas persoalan kemiskinan dan kesejahteraan sosial di Indonesia, sehingga menuntut pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif, berbasis data, dan responsif terhadap keragaman konteks sosial.

Suresh (2023, p. 463) menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari keterbatasan kapabilitas individu, seperti pendidikan dan kesehatan, yang secara signifikan memengaruhi kesejahteraan seseorang. Sejalan dengan itu, García-Gómez *et al.* (2024) menyatakan bahwa kemiskinan mencerminkan minimnya pendapatan dan deprivasi kapabilitas individu untuk mencapai kesejahteraan hidup, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik. Han (2023, p. 818) menegaskan bahwa sistem kesejahteraan sosial yang efektif perlu

mentransformasi individu agar tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar. Ketiga pandangan tersebut menegaskan bahwa isu kemiskinan dan kesejahteraan sosial harus dipahami secara simultan dan terintegrasi untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan.

Meskipun penelitian dan kajian mengenai kemiskinan dan kesejahteraan sosial terus berkembang, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam literatur yang ada. Pertama, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pendekatan kuantitatif dan kurang menggali aspek kualitatif yang bersifat sosial-kultural, seperti norma sosial, modal budaya, dan jaringan sosial. Kedua, tren riset global mengenai isu ini belum banyak ditelaah dalam konteks Indonesia. Relevansi hasil riset tersebut terhadap peran DPR RI dalam merumuskan dan mengawasi kebijakan sosial berbasis bukti juga masih jarang dibahas. Ketiga, penggunaan analisis bibliometrik sebagai metode untuk memetakan lanskap penelitian secara komprehensif, masih sangat terbatas digunakan dalam penelitian kemiskinan dan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari agenda pembangunan global. Hal ini tercermin dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan pada 2015, dengan salah satu tujuan utamanya adalah menghilangkan kemiskinan dalam segala bentuk pada 2030. Untuk mencapai tujuan ambisius ini, dibutuhkan pendekatan inovatif dan holistik, yang berfokus pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks ini, Arifin (2020, p. 115) mengusulkan konsep "budaya tanding" sebagai strategi alternatif dalam pengurangan kemiskinan. Pendekatan ini menekankan pentingnya transformasi nilai-nilai budaya yang menghambat mobilitas sosial, seperti fatalisme dan ketergantungan terhadap bantuan. Melalui "budaya tanding" tersebut, masyarakat miskin diharapkan mampu mengembangkan pola pikir yang lebih mandiri, produktif, inovatif, dan berdaya saing.

Di Indonesia, urgensi analisis bibliometrik dalam isu kemiskinan dan kesejahteraan sosial semakin mengemuka, terutama karena masih banyak program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Sering kali, perumusan kebijakan lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politis dan institusional, dibandingkan dengan bukti dan data empiris. Sebagai contoh, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada 2023 dikritik karena penyalurannya kurang tepat sasaran. Program ini juga dinilai berpotensi dimanfaatkan sebagai alat populisme menjelang Pemilihan Umum. Contoh lainnya adalah program Pemberdayaan Keluarga Miskin (PKM), yang belum sepenuhnya mempertimbangkan keberlanjutan dan melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga dampaknya dalam memutus rantai kemiskinan belum signifikan dan masih terbatas.

Kondisi ini menunjukkan adanya benang merah antara belum optimalnya program pengentasan kemiskinan dengan rendahnya pemanfaatan data dan hasil riset yang komprehensif, termasuk pendekatan bibliometrik. Di sisi lain, DPR RI sebagai lembaga legislatif memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi dan memastikan efektivitas program-program pemerintah, termasuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Melalui analisis bibliometrik, DPR RI dapat memetakan secara komprehensif arah dan fokus kebijakan berdasarkan penelitian tentang kemiskinan dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Temuan dari analisis ini diharapkan menjadi landasan kuat untuk merumuskan kebijakan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan berbasis bukti. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis tren riset global terkait kemiskinan dan kesejahteraan sosial, dengan fokus pada posisi dan kontribusi Indonesia.

Analisis Bibliometrik terhadap Riset Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial

Untuk memetakan dan memahami secara holistik tren riset mengenai kemiskinan dan kesejahteraan sosial, analisis bibliometrik digunakan sebagai pendekatan yang efektif, komprehensif, dan powerful. Berbeda dengan analisis konten tradisional yang berfokus pada isi dari setiap publikasi secara terpisah, analisis bibliometrik menelusuri pola-pola tersembunyi dalam kumpulan besar literatur ilmiah. Dengan menganalisis secara kuantitatif terhadap metadata publikasi, seperti judul, abstrak, kata kunci, dan sitasi, pendekatan ini mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan arah suatu bidang penelitian secara lebih luas.

Penelitian ini memetakan lanskap riset global mengenai kemiskinan dan kesejahteraan sosial selama 50 tahun terakhir (1975–2025), dengan menganalisis data publikasi ilmiah dalam basis data Scopus. Berbagai teknik analisis digunakan untuk menelusuri arah dan dinamika riset di bidang ini, yaitu analisis kutipan (*citation analysis*) untuk mengidentifikasi publikasi paling berpengaruh dan memetakan jaringan sitasi antarpeneliti serta antarinstansi; analisis kookurensi kata kunci (*co-word analysis*) untuk mengenali tema-tema dominan dan keterkaitan antartopik; dan analisis kolaborasi (*collaboration analysis*) untuk memahami pola kolaborasi antarpeneliti, instansi, dan negara. Ketiga teknik analisis ini dapat digunakan secara terpisah atau dikombinasikan sesuai dengan tujuan spesifik atau fokus utama penelitian.

Dalam hal ini, analisis bibliometrik dimulai dengan pengumpulan data publikasi ilmiah dari basis data yang kredibel. Penelitian ini menggunakan basis data Scopus sebagai sumber utama karena reputasinya dalam mengindeks jurnal-jurnal ilmiah berkualitas tinggi, cakupan data yang luas, dan metadata yang terstruktur rapi dan lengkap. Karakteristik ini memungkinkan analisis bibliometrik yang akurat dan mendalam terhadap perkembangan suatu bidang ilmu (Korde *et al.*, 2023).

Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis menggunakan perangkat lunak khusus, seperti VOSviewer atau Biblioshiny. Kedua perangkat lunak ini memudahkan visualisasi data yang intuitif dan informatif, memudahkan interpretasi hasil analisis, memperjelas pola sitasi, kolaborasi penulis, dan struktur dan arah perkembangan riset. Kombinasi keduanya memberikan pemetaan yang lebih komprehensif dan mudah diinterpretasikan, khususnya dalam kajian kemiskinan dan kesejahteraan sosial.

Penelitian ini mengacu pada klasifikasi bibliometrik dari García *et al.* (2024, p. 3), dengan tujuan utama menjembatani kesenjangan antara produksi pengetahuan akademik melalui riset dan kebutuhan perumusan kebijakan. Pendekatan bibliometrik ini dapat memberikan dasar kuat dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial di Indonesia, yang berbasis data dan bukti ilmiah.

Penelitian ini berupaya untuk menjawab sejumlah pertanyaan krusial terkait lanskap riset global mengenai kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Pertanyaan tersebut mencakup bagaimana perkembangan tren riset internasional tentang kemiskinan dan kesejahteraan sosial dalam lima dekade terakhir; negara mana saja yang paling aktif dan berkontribusi besar dalam publikasi; bagaimana posisi Indonesia dalam jaringan kolaborasi riset global; siapa saja penulis dan jurnal ilmiah yang paling produktif; apa saja tema paling dominan dalam kajian ini; bagaimana keterkaitan pola sitasi antardokumen yang membahas isu serupa; dan dokumen ilmiah mana yang paling berpengaruh dalam diskursus global.

Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai fokus penelitian, aktor kunci, dan arah pengembangan kajian di masa depan. Informasi ini sangat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, termasuk DPR RI, dalam

merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial di Indonesia yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.

Kemiskinan sebagai Fenomena Multidimensional

Kemiskinan bukan sekadar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar material, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian, melainkan mencakup juga deprivation nonmaterial yang membatasi akses terhadap sumber daya dan kesempatan penting, seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan (García-Gómez *et al.*, 2024; Xu *et al.*, 2024, p. 1). Karena kemiskinan bersifat kompleks, upaya penanggulangannya tidak hanya menuntut pemahaman mendalam, tetapi juga pendekatan menyeluruh dan multidimensional.

Untuk merancang kebijakan pengentasan kemiskinan yang efektif, diperlukan pemahaman menyeluruh terhadap kompleksitas kemiskinan yang terjadi dalam skala makro dan mikro. Pada tingkat makro, kemiskinan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik yang mencerminkan ketimpangan distribusi kesejahteraan secara luas di masyarakat. Adapun pada tingkat mikro, kemiskinan berdampak langsung terhadap kualitas hidup individu atau rumah tangga, seperti rendahnya pendapatan, terbatasnya akses pendidikan, dan buruknya kondisi kesehatan.

Berbagai penelitian telah mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan. Pramu dan Hutajulu (2023, p. 386) menemukan bahwa tingkat melek huruf berkorelasi negatif dengan kemiskinan, sedangkan inflasi berpengaruh positif terhadap peningkatan risiko kemiskinan. Namun, pengangguran yang diharapkan berdampak signifikan justru menunjukkan dampak yang tidak signifikan, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor lain atau kebijakan penanganan pengangguran yang telah diterapkan. Sejalan dengan itu, Aini dan Islamy (2021, p. 137) menemukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdampak negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan korelasi negatif. Menariknya, dalam studi ini, tingkat pengangguran dan pendidikan tidak menunjukkan pengaruh besar terhadap kemiskinan.

Kompleksitas kemiskinan menuntut adanya kerangka teoretis yang komprehensif. Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report/HDR) 2011 (Syawie & Sitepu, 2012, p. 29) menyoroti kesenjangan antara data statistik yang menunjukkan penurunan angka kemiskinan dengan kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat masih hidup dalam kemiskinan. Situasi ini menegaskan pentingnya perspektif yang lebih kritis dalam memahami kemiskinan. Memperkuat argumen tersebut, Maria Cati (2024, p. 1) menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya karena aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, politik, dan psikologis. Keterbatasan jaringan sosial, akses terhadap kekuasaan, dan faktor psikologis, seperti rendahnya rasa percaya diri dan harapan ikut berkontribusi pada lingkaran setan kemiskinan. Sementara itu, Hao *et al.* (2024, p. 2908) mengkritisi paradigma kebijakan yang cenderung berfokus pada aspek ekonomi dan menganggap masyarakat miskin sebagai objek, bukan subjek. Kritik ini sejalan dengan konsep kemiskinan struktural, yang menyoroti sistem dan struktur sosial justru mempertahankan ketimpangan dan menghalangi mobilitas sosial.

Pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pengentasan kemiskinan ditegaskan oleh Wulandari *et al.* (2022, p. 3213). Selain itu, peningkatan kemampuan manusia melalui pemenuhan kebutuhan pokok dan pengembangan ekonomi berkelanjutan merupakan langkah strategis yang harus diimbangi dengan penciptaan kondisi pendukung, seperti stabilitas ekonomi dan akses terhadap kebutuhan pokok. Namun, pengentasan kemiskinan juga perlu memperhatikan dimensi kemiskinan kultural.

Arifin (2020, p. 114) menekankan bahwa budaya kemiskinan yang ditandai dengan sikap pasrah dan pasif dapat diwariskan secara turun temurun dan menghambat perubahan sosial. Dalam konteks ini, teori *culture of poverty* yang dikemukakan Oscar Lewis menjelaskan bagaimana lingkungan dengan akses terbatas terhadap sumber daya dapat menciptakan pola pikir dan perilaku yang melanggengkan siklus kemiskinan dan menjebak masyarakat di dalamnya (Sari & Solikah, 2024, p. 72).

Pemahaman yang komprehensif tentang kemiskinan, yang mencakup aspek struktural, kultural, dan faktor-faktor penyebabnya, merupakan fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pengentasan yang efektif. Dalam hal ini, riset dan data berperan sentral dalam menyediakan bukti empiris mengenai tren, pola, dan determinan kemiskinan. Salah satu pendekatan yang relevan adalah analisis bibliometrik, yang memungkinkan pemetaan perkembangan tema riset, identifikasi aktor kunci, serta pengaruh antarpeneliti. Sebagai contoh, penelitian menggunakan teknik *partial least squares* (PLS) untuk menganalisis kemiskinan multidimensional di Meksiko, yang menunjukkan bagaimana metode kuantitatif dapat memperkaya pemahaman terhadap kompleksitas kemiskinan (García *et al.*, 2024, p. 1). Temuan dari analisis semacam ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dalam merancang strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan berbasis bukti.

Selain itu, data statistik mengenai indikator kemiskinan, seperti tingkat pendapatan, pengangguran, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, merupakan alat kuantitatif penting untuk mengukur efektivitas kebijakan sosial. Sebuah studi mengenai kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa berbagai program sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan, sekaligus memperlihatkan tantangan dalam implementasinya (Sari *et al.*, 2024, p. 14). Dengan demikian, riset dan data tidak hanya menjadi dasar teoretis bagi perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan, tetapi juga sebagai alat yang esensial untuk monitoring dan evaluasi efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Kebijakan Publik

Kesejahteraan sosial di Indonesia memiliki makna keadaan sejahtera masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016). Meskipun definisi ini bersifat umum, konsep tersebut menjadi titik pijak penting dalam pengembangan kebijakan sosial nasional. Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan Sosial) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pemaknaan ini sejalan dengan definisi menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menekankan kesejahteraan sosial mencakup kegiatan terorganisir yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mempromosikan kesehatan (Hasrimi *et al.*, 2024).

Konsep kesejahteraan sosial di Indonesia telah berevolusi, tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga dimensi yang lebih luas. Dimensi tersebut meliputi dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual. Dimensi ekonomi, yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, akses terhadap pekerjaan layak, dan jaminan pendapatan. Dimensi sosial meliputi akses terhadap layanan sosial dasar, pendidikan, kesehatan, dan sistem dukungan sosial. Dimensi spiritual menekankan pada kebebasan beragama

dan menjalankan ibadah, sedangkan dimensi budaya berfokus pada pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal (Setiawan, 2019, p. 210). Sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya (Widodo & Galang, 2019). Komitmen ini tercermin dalam implementasi berbagai program jaminan sosial dan perlindungan sosial dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Kementerian Sosial, 2019).

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial secara komprehensif, Indonesia telah mengembangkan berbagai indikator dan instrumen pengukuran. Salah satu instrumen utama adalah Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan berbagai lembaga penelitian (Setiawan, 2019, p. 210). IKS mengintegrasikan lima dimensi utama pengukuran. Dimensi kesehatan dan gizi diukur melalui angka harapan hidup, status gizi masyarakat, akses terhadap layanan kesehatan. Sementara itu, dimensi pendidikan dan keterampilan dilihat dari tingkat literasi, rata-rata lama sekolah, akses terhadap pendidikan berkualitas. Selanjutnya, dimensi pekerjaan dan pendapatan meliputi tingkat pengangguran, pendapatan per kapita, ketahanan ekonomi keluarga, sedangkan dimensi perumahan dan lingkungan mencakup akses terhadap hunian layak, sanitasi dan air bersih, kualitas lingkungan hidup. Terakhir, dimensi kehidupan sosial dan budaya mencakup partisipasi sosial, kohesi sosial, pelestarian nilai budaya. Pengukuran kesejahteraan sosial ini tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga mempertimbangkan dimensi non-material yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat secara holistik (Hasrimi *et al.*, 2024, p. 3). Hal ini sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Kementerian Sosial, 2019).

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut mencakup kesenjangan ekonomi, kapasitas kelembagaan, dan perubahan demografis. Kesenjangan ekonomi terjadi akibat dari disparitas pendapatan antarwilayah dan ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi. Sementara itu, kapasitas kelembagaan dipengaruhi oleh koordinasi antarlembaga yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, serta sistem data dan informasi yang belum terintegrasi. Sementara itu, perubahan demografis meliputi peningkatan penduduk lanjut usia (*aging population*), urbanisasi, dan perubahan struktur keluarga (Widodo & Galang, 2019). Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Sosial Republik Indonesia, (2019) mengusulkan empat strategi utama, yaitu penguatan sistem perlindungan sosial melalui perluasan cakupan jaminan sosial, peningkatan kualitas layanan sosial dasar, pengembangan sistem bantuan sosial yang terintegrasi; pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan ekonomi lokal, penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan partisipasi sosial; reformasi kebijakan berupa harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi lintas sektor, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi; dan inovasi sosial melalui pemanfaatan teknologi digital, pengembangan model layanan sosial berbasis komunitas, kemitraan multi-pihak. Implementasi strategi-strategi tersebut memerlukan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan (Setiawan, 2019, p. 211). Dalam hal ini, kolaborasi dan sinergi antarpihak menjadi kunci keberhasilan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia (Hasrimi *et al.*, 2024, p. 4).

Pancasila berfungsi sebagai landasan utama dalam sistem kesejahteraan masyarakat Indonesia karena kelima sila mencerminkan nilai-nilai dasar yang menopang pengembangan kesejahteraan sosial secara holistik. Sila pertama menekankan nilai spiritual yang menjadi landasan moral dalam membangun kehidupan sosial

yang harmonis. Sila kedua dan ketiga menggarisbawahi pentingnya nilai kemanusiaan dan persatuan sebagai elemen fundamental dalam menciptakan keadilan sosial serta memperkuat solidaritas nasional (Aji & Legowo, 2024, p. 211). Selanjutnya, sila keempat dan kelima mendukung prinsip demokrasi ekonomi dan distribusi kesejahteraan yang adil dengan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan serta pemerataan akses terhadap sumber daya. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai pedoman normatif dalam perancangan kebijakan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan sosial, penyediaan layanan dasar, serta upaya pengurangan ketimpangan ekonomi (Putra *et al.*, 2024, p. 235). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem kesejahteraan sosial harus mencakup prinsip keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini menjamin akses yang setara bagi setiap individu terhadap sumber daya dan kesempatan. Selain itu, ketiga prinsip tersebut menggarisbawahi bahwa penerapan Pancasila dalam kebijakan kesejahteraan sosial berorientasi pada aspek material dan mempertimbangkan dimensi spiritual, sosial, dan budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Fadlail, 2024, p. 404).

Huda dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Kesejahteraan Sosial (Paradigma dan Teori)* menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan ilmu praktik yang membutuhkan metode intervensi. Metode intervensi memiliki beberapa ruang lingkup kesejahteraan sosial, yang secara umum dibagi menjadi tiga wilayah. Wilayah pertama merupakan wilayah mikro, yang mencakup intervensi secara perseorangan. Banyak yang berpendapat bahwa wilayah mikro ini tidak relevan dengan masyarakat Indonesia yang memiliki ciri khas masyarakat yang komunal dan tidak individual seperti orang-orang negara barat. Namun, penelitian yang dilakukan oleh dosen Program Studi Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, intervensi mikro ini bisa terjadi di kota-kota besar Indonesia karena sudah mengalami transformasi menjadi masyarakat industri yang individualis (Huda, 2012, p. 10).

Ruang lingkup yang kedua adalah *mezzo*, yang mencakup intervensi terhadap keluarga atau kelompok kecil. Dalam pendekatan ini, setiap individu yang memiliki permasalahan sosial serupa sering disatukan dalam suatu kelompok kecil untuk membentuk sistem dukungan sosial yang saling menguatkan. Sementara itu, ruang lingkup yang ketiga adalah makro, yang berhubungan langsung dengan kelompok dalam skala besar atau masyarakat luas. Pendekatan makro ini melibatkan penerapan berbagai metode penanganan masalah sosial, seperti *community development*, *policy analysis*, advokasi, pengorganisasian komunitas (Huda, 2012, p. 12).

Di sisi lain, masyarakat Indonesia memiliki potensi sumber kesejahteraan sosial yang kuat melalui budaya filantropi atau kedermawanan (Muslikhah & Kurniawan, 2023; Nurjanah *et al.*, 2021; Pranadji, 2017). Nilai-nilai ini tercermin dari tradisi gotong royong yang masih hidup dalam kehidupan keseharian berbagai suku di Indonesia. Namun, sejak masa penjajahan di Indonesia, sejumlah tradisi lokal mulai berinteraksi dan terpengaruh oleh nilai-nilai budaya barat, termasuk dalam hal praktik sosial. Salah satu contohnya adalah penggunaan bahasa. Saat itu, kemampuan masyarakat berbahasa Belanda atau Inggris dianggap sebagai simbol kehormatan sosial. Dari sini terlihat bahwa penggunaan bahasa dari negara penjajah merupakan bagian dari pemaksaan dan membentuk kerangka awal pengembangan ilmu kesejahteraan sosial di Indonesia sebagai respons terhadap perubahan sosial akibat kolonialisme (Huda, 2012, p. 21).

Kemiskinan dan kesejahteraan sosial merupakan dua isu yang sangat erat kaitannya. Kemiskinan tanpa dukungan keahlian dan pendidikan yang cukup menjadi salah

satu penyebab utama masalah sosial seperti keberadaan gelandangan dan pengemis. Piran dan Mardjono, (2022, p. 604) menyatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam menangani isu ini sering kali tidak efektif karena lebih memprioritaskan pendekatan hukum yang lebih bersifat agresif, seperti penalti, ketimbang metode yang memfokuskan pada pemeliharaan atau rehabilitasi sosial. Sebagai alternatif, UU Kesejahteraan Sosial menyediakan suatu kerangka yang lebih baik untuk mengatasi kemiskinan melalui penyediaan jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan pokok. Di samping itu, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 memberikan arahan untuk tindakan preventif, represif, dan rehabilitasi, termasuk bimbingan sosial, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan keberadaan gelandangan dan pengemis. Keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak hanya tergantung pada peraturan yang ada, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagai penyumbang sangat krusial untuk membantu pengemis beralih dari meminta-minta ke kegiatan yang lebih produktif (Piran & Mardjono, 2022, p. 605).

Pengembangan kesejahteraan sosial di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang signifikan. Peluang tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi yang stabil, reformasi kebijakan, pemanfaatan teknologi digital, serta kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga masyarakat yang semakin luas. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial semakin diperkuat dengan berbagai kebijakan perlindungan sosial yang diterapkan pemerintah untuk merespons dampak sosial dan ekonomi, terutama di tengah situasi krisis seperti pandemi COVID-19 (Prasetyo *et al.*, 2023). Namun, berbagai tantangan masih membayangi, termasuk keterbatasan dana, kesenjangan akses terhadap layanan dasar di berbagai daerah, serta kurangnya koordinasi antar-lembaga pemerintah. Selain itu, faktor geografis dan demografis juga menjadi hambatan utama dalam memastikan distribusi kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Indonesia (Maridjo & Mudayen, 2023, p. 79). Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam merancang kebijakan yang lebih inovatif. Penggunaan teknologi digital dan data berbasis bukti menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki efektivitas kebijakan kesejahteraan sosial serta memperluas jangkauan layanan hingga ke daerah terpencil.

Peran aktif masyarakat dan pemerintah merupakan elemen krusial dalam mencapai kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Masyarakat berperan sebagai aktor utama dalam pembangunan dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik, sementara pemerintah bertugas menciptakan kebijakan yang mendukung partisipasi tersebut serta memastikan akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja (Munandar, 2020). Studi menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, seperti yang terlihat dalam program rehabilitasi sosial berbasis collaborative governance, dengan keterlibatan sektor swasta dan masyarakat untuk mempercepat upaya perbaikan kondisi sosial dan ekonomi (Priadi *et al.*, 2024, p. 152). Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya penting dalam pemilihan umum, tetapi juga dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi hasil kebijakan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan turut meningkatkan stabilitas sosial serta memacu inovasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional (Irawan & Mailin, 2024, p. 48).

Dalam menghadapi tantangan global seperti ketimpangan sosial, perubahan iklim, dan ekonomi yang semakin terhubung, kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembangunan negara. Pemerintah

bertanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan memperkuat peran masyarakat sebagai mitra dalam pembangunan. Sementara itu, masyarakat diharapkan dapat mendukung serta memanfaatkan kebijakan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan sosial mereka secara berkelanjutan. Menurut Hardiyati *et al.*, (2023, p. 91), kesejahteraan sosial secara global muncul dari kesadaran untuk mengatasi ketimpangan sosial dan kemiskinan, yang mendorong berbagai negara mengembangkan sistem sosial bagi warganya. Sistem ini memastikan setiap individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial, memperoleh akses yang setara atas kebutuhan dasar, serta mendukung pemberdayaan atas individu dan kelompok sehingga mereka bisa berfungsi secara optimal dalam masyarakat.

Kesejahteraan sosial memiliki hubungan erat dengan multikulturalisme, karena penerimaan terhadap keberagaman menjadi faktor penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif. Menurut Gasimova (2024, p. 80), multikulturalisme bukan hanya merupakan pendekatan sosial, melainkan doktrin filosofis utama dalam pengembangan politik dan budaya masyarakat modern. Pendekatan ini menggantikan pendekatan universalisme, dengan menekankan pentingnya peran etnisitas dan identitas budaya dalam sistem sosial. Namun, keberagaman yang tidak dikelola secara tepat dapat memicu konflik sosial dan ketegangan politik, terutama akibat perbedaan budaya dan etnisitas. Oleh karena itu, studi tentang multikulturalisme dan kesejahteraan sosial sangat penting untuk memahami bagaimana masyarakat majemuk dapat mencapai kesetaraan dan kebebasan individu demi mengurangi potensi konflik sosial (Zulkarnain *et al.*, 2024, p. 135).

Penelitian oleh Wisdayanti *et al.* (2023, p. 44) mengeksplorasi hubungan antara multikulturalisme dan kesejahteraan sosial, dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi keterkaitan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa multikulturalisme terbukti menjadi solusi efektif dalam mengatasi konflik sosial di masyarakat yang beragam. Pendekatan ini juga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai penghormatan terhadap perbedaan budaya dan ras, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial melalui pengurangan diskriminasi dan perluasan akses terhadap layanan sosial bagi kelompok rentan. Temuan penting lainnya dari penelitian ini adalah interaksi sosial dan budaya membantu individu beradaptasi dalam masyarakat multikultural, serta pendidikan berbasis multikultural berperan dalam membangun sikap toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman. Dengan demikian, multikulturalisme dapat menjadi strategi efektif untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis, serta mendukung pencapaian kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Analisis Bibliometrik Riset Sosial Indonesia

Analisis bibliometrik dalam penelitian ini mengacu pada tujuh tahapan sistematis yang dikembangkan sebagai kerangka kerja Passas (2024, hlm. 1015). Kerangka ini memastikan pendekatan terstruktur dari perumusan tujuan hingga pelaporan hasil, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1. Ketujuh tahapan tersebut adalah (1) tentukan tujuan penelitian dengan menetapkan tujuan spesifik penelitian untuk memandu seluruh proses analisis, termasuk pemilihan kata kunci dan teknik; (2) pencarian literatur dan pengumpulan data dilakukan secara sistematis di basis data terpilih (misalnya, Scopus) dengan menggunakan kata kunci untuk memperoleh publikasi yang relevan; (3) pembersihan dan pra-pemrosesan data dilakukan dengan membersihkan dan memproses data, seperti menghapus duplikat dan melakukan standarisasi agar data siap digunakan secara valid dan reliabel; (4) pemilihan teknik bibliometrik

dengan memilih teknik bibliometrik yang sesuai berdasarkan tujuan penelitian, seperti ko-sitasi atau ko-kata; (5) analisis data dilakukan dengan menerapkan teknik terpilih pada dataset telah dibersihkan, dengan menggunakan perangkat lunak analisis bibliometrik; (6) visualisasi untuk memvisualisasikan hasil analisis dalam bentuk peta jaringan atau grafik agar memudahkan interpretasi dan presentasi data; dan (7) interpretasi dan pelaporan untuk menginterpretasikan temuan yang diperoleh, menghubungkan dengan tujuan, dan menyusun laporan komprehensif untuk mendeskripsikan hasil dan implikasi analisis.

Tabel 1. Langkah Analisis Bibliometrik

No	Langkah	Deskripsi	Hasil yang Diharapkan
1	Tentukan tujuan penelitian	Uraikan dengan jelas tujuan dari analisis bibliometrik.	Pertanyaan dan tujuan penelitian yang jelas.
2	Pencarian literatur dan pengumpulan data	Kumpulkan literatur yang relevan dari basis data Web of Science, Scopus, dan Google Scholar atau kumpulkan data mentah (misalnya, dari non-basis data) dan buat basis data sendiri.	Kumpulan data publikasi relevan yang komprehensif.
3	Pembersihan dan pra-pemrosesan data	Bersihkan dan lakukan pra-pemrosesan data untuk memastikan akurasi (misalnya, menghapus duplikasi dan memperbaiki nama penulis).	Kumpulan data yang telah disempurnakan dan akurat, siap untuk dianalisis.
4	Pemilihan teknik bibliometrik	Pilih teknik bibliometrik yang sesuai berdasarkan tujuan penelitian (misalnya, analisis ko-sitasi, analisis ko-kata, <i>bibliographic coupling</i>).	Identifikasi teknik analisis yang sesuai.
5	Analisis data	Lakukan analisis menggunakan teknik yang dipilih.	Wawasan dan pola dalam literatur.
6	Visualisasi	Visualisasikan hasil untuk membantu interpretasi dan presentasi.	Grafik, peta, dan representasi visual data lainnya.
7	Interpretasi dan pelaporan	Interpretasikan hasil dan siapkan laporan yang merinci temuan serta implikasinya.	Laporan komprehensif dengan wawasan dan rekomendasi.

Sumber: Passas (2024).

Pencarian Data dan Penyaringan

Analisis bibliometrik ini diawali dengan pengumpulan data dari basis data Scopus, mengikuti tujuh tahapan yang diusulkan oleh Passas, (2024, p. 1015), sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1. Pencarian awal dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang komprehensif terkait kemiskinan dan kesejahteraan sosial, yaitu *TITLE-ABS-KEY (poverty OR social welfare OR social inequality OR socioeconomic disparity OR income inequality) AND (social policy OR social protection OR social support OR welfare system)*. Hasil pencarian ini menghasilkan 12,211 dokumen yang terbit antara 1974 hingga 2024. Pemilihan kata kunci ini didasarkan pada pemahaman konseptual kemiskinan dan kesejahteraan sosial yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik.

Proses penyaringan data menjadi tahap krusial untuk menjamin relevansi dan ketepatan hasil analisis, sebagaimana ditegaskan oleh Zupic dan Čater, (2015, p. 430). Untuk memastikan fokus penelitian pada konteks Indonesia, dilakukan penyaringan tambahan untuk memilih artikel yang secara khusus membahas isu kemiskinan dan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Tabel 2. Penelitian Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Pertama Kali Muncul dalam Jurnal Terindeks

Penulis	Judul	Sumber	Tahun
	<i>Reviews and notices of books</i>	<i>British Journal of Inebriety</i>	1924
Rubio Palacios, H.	<i>Fuicio critico sobre la protecci3n econ3mica y social del tuberculoso en nuestro pais (Criticism of economic and social protection of the tuberculous in our country)</i>	<i>Revista mexicana de tuberculosis y enfermedades del aparato respiratorio</i>	1953
Rognato, C.	<i>Rilievi e considerazioni sulla protezione sociale nella tubercolosi (Findings and remarks on social protection in tuberculosis)</i>	<i>L' Arcispedale S. Anna di Ferrara</i>	1956

Sumber: Scopus (2025).

Tabel 2 menunjukkan contoh publikasi awal tentang kemiskinan dan kesejahteraan sosial yang terindeks di Scopus. Penelitian-penelitian ini dipublikasikan antara 1924 hingga 1956, yang menunjukkan bahwa isu kemiskinan dan kesejahteraan sosial telah menjadi perhatian para peneliti sejak lama. Untuk mempersempit fokus penelitian pada konteks Indonesia, pencarian kemudian diperbarui dengan menambahkan TITLE-ABS-KEY (Indonesia) dan memfilter jenis dokumen menjadi *article*. Langkah ini menghasilkan 108 artikel yang secara khusus membahas isu kemiskinan dan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Tabel 3. Hasil Penyempurnaan Pencarian

Penulis	Judul	Sumber	Tahun
You, P. S., Rao, B., & Shantakumar, G.	<i>Social policy and population growth in South East Asia</i>	<i>International Labour Review</i>	1974
McCulla, J. W.	<i>Where population planning makes a dent: (Indonesia).</i>	<i>Front Lines</i>	1979
	<i>Mortality in Asia</i>	<i>World Health Organization Chronicle</i>	1981

Sumber: Scopus (2025).

Tabel 3 menyajikan contoh artikel yang ditemukan setelah proses penyaringan. Selanjutnya, data artikel tersebut diunduh dalam format CSV untuk dianalisis menggunakan perangkat lunak Biblioshiny. Biblioshiny memungkinkan analisis bibliometrik yang lebih mendalam, meliputi pemetaan pola penelitian, analisis hubungan antarkata kunci, dan visualisasi jaringan penelitian. Perangkat lunak ini telah banyak digunakan dalam studi bibliometrik untuk memahami tren dan perkembangan penelitian dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam hal ini, Purnomo *et al.* (2022) memetakan perkembangan penelitian berdasarkan kata kunci dan kolaborasi penulis. Melalui analisis Biblioshiny, data yang terstruktur ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat tentang topik penelitian yang dianalisis. Tahapan pencarian dan penyaringan juga menegaskan pentingnya metodologi sistematis dalam menyoroti konteks Indonesia, agar temuan yang dihasilkan tidak hanya akurat secara data tetapi juga relevan secara kebijakan.

Daftar Penulis Paling Relevan

Visualisasi *most relevant authors* dalam Gambar 1 menunjukkan bahwa Suryahadi dan Yuda merupakan penulis dengan kontribusi terbanyak, masing-masing dengan 4

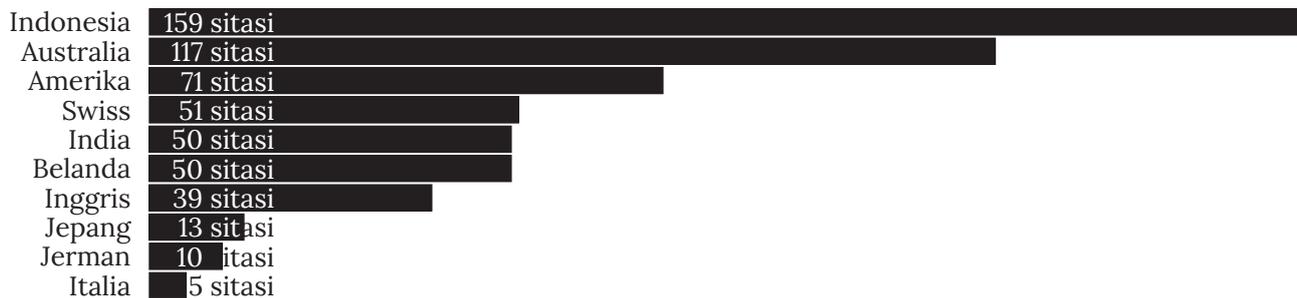


Gambar 1. Daftar Penulis Paling Relevan

Sumber: Scopus (2025).

publikasi. Dominasi mereka mengindikasikan adanya peneliti kunci yang secara konsisten meneliti isu kemiskinan dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Fokus penelitian mereka, yang kemungkinan berkaitan dengan ekonomi, kebijakan sosial, atau kesejahteraan masyarakat, mencerminkan isu-isu krusial dalam konteks Indonesia. Selain itu, terdapat beberapa penulis lain, seperti Al Izzati (3 publikasi), Fitrinita, Hudang, dan Kafaa, (masing-masing 2 publikasi), yang juga aktif meneliti tema serupa. Keberagaman penulis ini menunjukkan adanya kolaborasi dan keterlibatan dari berbagai disiplin ilmu dalam memperkaya pemahaman tentang kemiskinan dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Selain itu, konsistensi penelitian dari penulis kunci seperti Suryahadi dan Yuda dapat menjadi rujukan utama dalam perumusan kebijakan berbasis riset dan pembentukan jaringan peneliti sosial yang berkelanjutan di Indonesia.

Negara dengan Jumlah Sitasi Terbanyak



Gambar 2. Negara dengan Jumlah Sitasi Terbanyak

Sumber: Scopus (2025).

Visualisasi *countries with the most citations* pada Gambar 2 menunjukkan bahwa Indonesia mendominasi dengan 159 sitasi, menegaskan posisinya sebagai pusat perhatian dalam penelitian tentang kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Tingginya jumlah sitasi ini menunjukkan bahwa penelitian di Indonesia dianggap relevan dan berpengaruh dalam diskusi global tentang isu tersebut. Australia mengikuti di urutan kedua dengan 117 sitasi, mengindikasikan adanya keterkaitan dan kolaborasi penelitian yang erat antara Indonesia dan Australia. Amerika Serikat, sebagai pusat penelitian dunia, memberikan kontribusi signifikan dengan 71 sitasi, Ini menunjukkan bahwa isu kemiskinan dan kesejahteraan sosial di Indonesia juga mendapat perhatian dari para peneliti di Amerika Serikat. Swiss, India, dan Belanda juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan, sedangkan Jepang, Jerman, dan Italia menunjukkan jumlah sitasi yang lebih rendah. Variasi jumlah sitasi ini mencerminkan perbedaan intensitas dan fokus penelitian di berbagai negara. Dominasi sitasi dari negara mitra menunjukkan adanya potensi perluasan diplomasi riset Indonesia di bidang sosial, serta peluang memperkuat kerja sama strategis lintas negara dalam pengentasan kemiskinan.

Sitasi Terbanyak

Suryahadi, A. (2020)	<i>Bulletin of Indonesian Economic Studies</i>	83 sitasi
Bird, R. (1999)	<i>Public Administration and Development</i>	57 sitasi
Das, J. (2009)	<i>The World Bank Economic Review</i>	51 sitasi
Van Eeuwijk, P. (2006)	<i>Ageing & Society</i>	51 sitasi
Krishnan, A. (2011)	<i>Health Promotion International</i>	50 sitasi
Tadjoeddin, M. Z. (2007)	<i>Journal of Peace Research</i>	49 sitasi
Dhanani, S. (2002)	<i>World Development</i>	47 sitasi
Sebayang, S. K. (2019)	<i>Women & Health</i>	38 sitasi
Cameron, L. (2014)	<i>Economic Development and Cultural Change</i>	34 sitasi
Januraga, P. P. (2014)	<i>BMC Public Health</i>	32 sitasi

Gambar 3. Sitasi Artikel Terbanyak

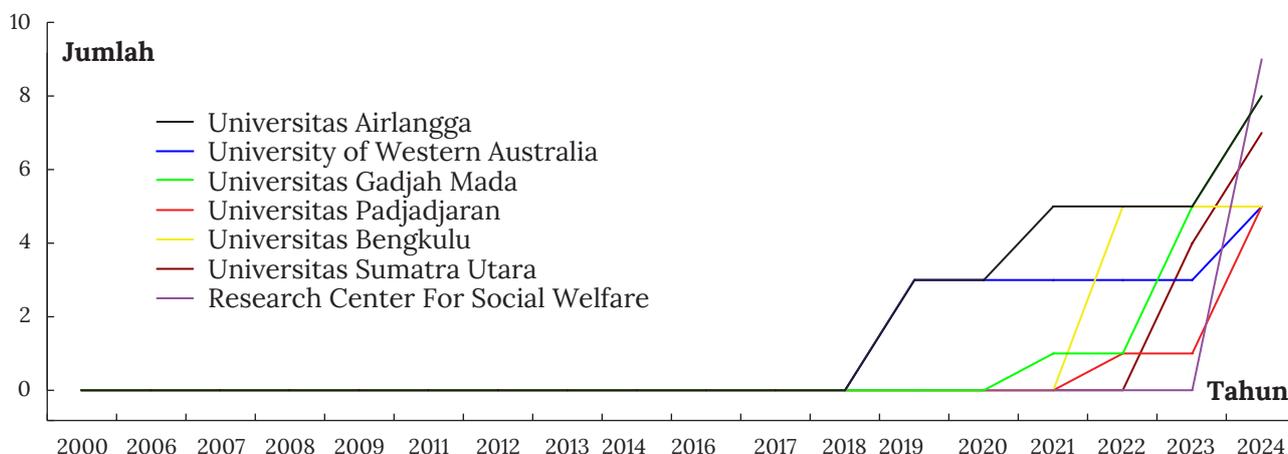
Sumber: Scopus (2025).

Berdasarkan Gambar 3, visualisasi *most global cited documents* menunjukkan bahwa penelitian terkait isu ekonomi dan kebijakan sosial di Indonesia memiliki pengaruh yang besar dalam diskursus global. Dominasi karya Suryahadi (2020) tentang isu ekonomi dalam *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, dengan 83 sitasi, menegaskan pentingnya pendekatan berbasis riset dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang efektif.

Tingginya sitasi pada karya Bird (1999) tentang administrasi publik dan Das (2009) tentang ekonomi menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga pada efektivitas implementasi program dan dukungan lembaga internasional. Menariknya, karya Van Eeuwijk (2006) tentang penuaan dan Tadjoeddin (2007) tentang perdamaian juga mendapatkan sitasi tinggi. Hal ini mengimplikasikan bahwa isu kemiskinan perlu dikaji secara holistik dan mempertimbangkan faktor-faktor demografis dan konteks sosial politik.

Secara keseluruhan, visualisasi ini menggarisbawahi perlunya pendekatan multidimensional dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut dapat menjadi landasan dalam mengembangkan strategi yang komprehensif, melibatkan berbagai disiplin ilmu, dan mempertimbangkan berbagai faktor yang saling berkaitan. Selain itu, dokumen dengan sitasi tinggi dapat dijadikan referensi kunci untuk menyusun kebijakan sosial yang teruji secara global dan kontekstual secara nasional, utamanya terkait ekonomi dan pembangunan manusia.

Perkembangan Jumlah Artikel yang Dipublikasi Berdasarkan Afiliasi



Gambar 4. Jumlah Artikel yang Dipublikasi Berdasarkan Afiliasi, 2000-2024

Sumber: Scopus (2025).

Visualisasi *number of articles by affiliation* dalam Gambar 4 menunjukkan peningkatan signifikan dalam terbitan artikel ilmiah tentang kemiskinan dan kesejahteraan sosial di Indonesia, terutama antara 2020 hingga 2024. Fenomena ini memiliki implikasi penting terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Meningkatnya jumlah terbitan dari Universitas Airlangga dan Universitas Gadjah Mada, mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas dan kepedulian institusi dalam negeri terhadap isu kemiskinan. Pemerintah dapat memanfaatkan potensi ini dengan melibatkan para peneliti dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan. Peningkatan kapasitas ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memperoleh data dan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Kehadiran kontribusi dari University of Western Australia menunjukkan adanya potensi kolaborasi riset internasional yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh perspektif dan pendekatan baru dalam mengatasi kemiskinan. Kolaborasi ini dapat difasilitasi dan diperluas untuk mendorong transfer pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi Indonesia. Meningkatnya jumlah penelitian tentang kemiskinan dan kesejahteraan sosial menciptakan peluang bagi pemerintah untuk semakin memperkuat kebijakan berbasis bukti. Pemerintah dapat membangun sistem yang lebih terstruktur untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menerapkan hasil penelitian dalam program-program pengentasan kemiskinan.

Dengan memaksimalkan potensi dari tren positif yang ditunjukkan dalam visualisasi ini, diharapkan kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat lebih efektif, inovatif, dan berkelanjutan. Selain itu, meningkatnya kontribusi universitas-universitas dalam negeri dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai mitra riset aktif dalam perumusan dan evaluasi kebijakan sosial.

Afiliasi Paling Relevan



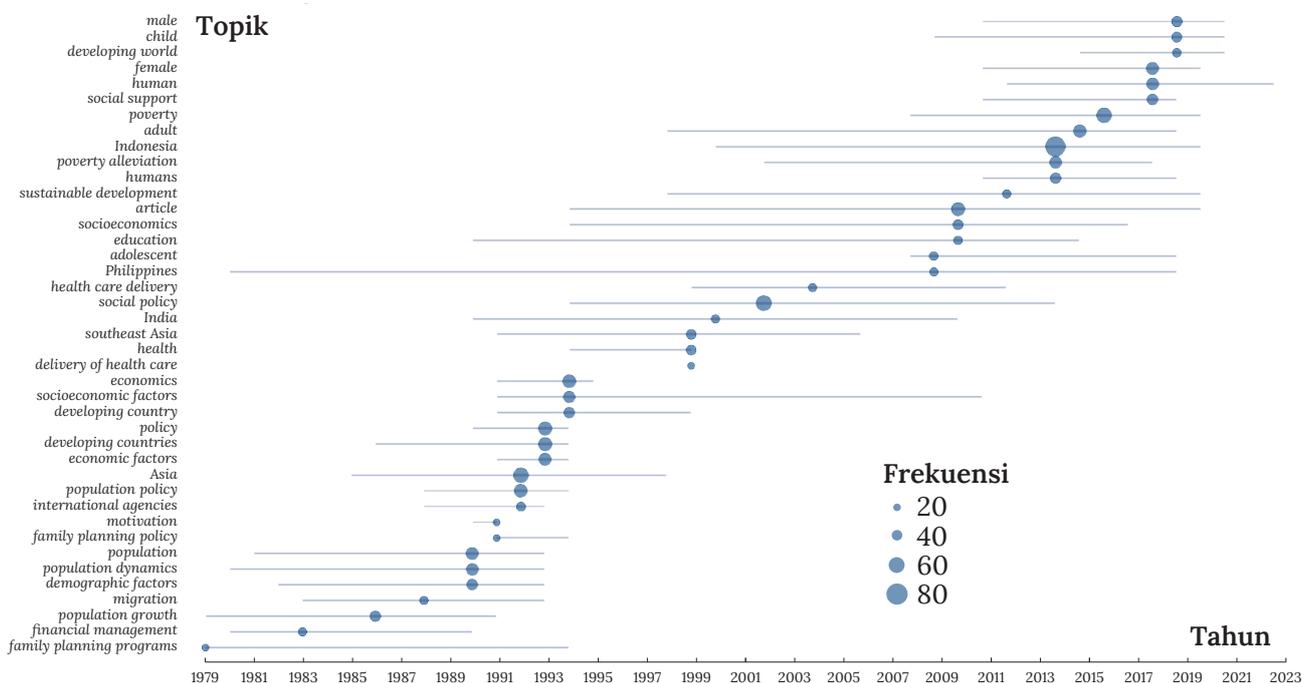
Gambar 5. Afiliasi Paling Relevan

Sumber: Scopus (2025).

Visualisasi *most relevant affiliations* pada Gambar 5 menunjukkan institusi mana yang memiliki pengaruh paling besar dalam penelitian tentang kemiskinan dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Research Center for Social Welfare menduduki peringkat teratas dengan 9 publikasi, mengindikasikan fokus dan keahlian mereka dalam bidang ini. Universitas Airlangga dan Universitas Gadjah Mada mengikuti di urutan berikutnya. Hal ini menegaskan kembali peran kunci para peneliti dan akademisi dalam penelitian di Indonesia. Kehadiran institusi lain, seperti Universitas Sumatra Utara dan Universitas Padjadjaran, menunjukkan bahwa penelitian di bidang ini juga berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Menariknya, terdapat beberapa afiliasi internasional dalam daftar ini, seperti University of Western Australia dan Development Research Group, mencerminkan kolaborasi penelitian yang signifikan antara institusi di Indo-

nesia dan luar negeri. Dominasi afiliasi riset lokal dan mitra internasional menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan riset sosial berbasis kolaborasi lintas sektor.

Tren Topik Penelitian



Gambar 6. Tren Topik, 1979–2023

Sumber: Scopus (2025).

Pemetaan *trend topic* pada Gambar 6 mengilustrasikan dinamika pergeseran fokus penelitian tentang kemiskinan dan kesejahteraan sosial di Indonesia dari waktu ke waktu. Pada awal 1990-an, beberapa tema, seperti kemiskinan, pendidikan, sosioekonomi, dan pelayanan kesehatan mendominasi penelitian. Hal ini mencerminkan perhatian global terhadap isu-isu mendasar yang banyak dihadapi negara berkembang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran fokus ke arah pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan, seperti yang ditunjukkan oleh meningkatnya frekuensi kata kunci “pembangunan berkelanjutan” dan “dukungan sosial”.

Tren ini mengindikasikan adanya kesadaran yang semakin meningkat tentang pentingnya memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu dalam upaya mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain itu, munculnya tema-tema baru seperti “kesehatan remaja” dan “program perencanaan keluarga” menunjukkan bahwa penelitian juga mulai menjelajahi isu-isu yang lebih spesifik dan mendalam. Perubahan fokus tematik menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan harus adaptif terhadap isu-isu baru yang muncul.

Word Cloud

Berdasarkan Gambar 7, *word cloud* menunjukkan kata-kata kunci utama yang sering muncul dalam studi tentang Indonesia. Kata Indonesia memiliki ukuran terbesar, menekankan bahwa ini adalah pusat perhatian geografi dari penelitian ini. Kata-kata seperti *poverty*, *social policy*, dan *developing countries* juga terlihat jelas, menunjukkan minat yang besar terhadap isu sosial, ekonomi, dan kebijakan yang berkaitan dengan negara-negara yang sedang berkembang, terutama mengenai pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Selain itu, istilah seperti *popula-*

internasional, atau isu-isu baru yang relevan secara global. Tren ini juga menunjukkan peran kunci dari institusi penelitian dan para peneliti dalam mendorong inovasi dan kontribusi ilmiah, terutama dalam konteks penelitian yang berkaitan dengan Indonesia. Tren dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai landasan untuk mengintegrasikan hasil riset dalam proses perumusan kebijakan.

Sumber-Sumber Informasi Paling Relevan



Gambar 9. Sumber Paling Relevan

Sumber: Scopus (2025).

Gambar 9 menunjukkan bahwa dominasi *Bulletin of Indonesian Economic Studies* (BIES) sebagai sumber utama dalam publikasi terkait Indonesia, dengan 11 dokumen yang berfokus pada isu ekonomi. Ini menunjukkan kuatnya orientasi penelitian terhadap solusi ekonomi untuk permasalahan di Indonesia, termasuk isu kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan pengentasan kemiskinan di Indonesia cenderung bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor terkait. Meskipun jumlah publikasinya relatif sedikit, kehadiran jurnal seperti *Economic Development and Cultural Change*, *Integration* (Tokyo, Jepang), *BMC Public Health*, dan *Asian Social Science*, mengindikasikan adanya pergeseran perspektif dalam memahami isu kemiskinan. Jurnal-jurnal tersebut menunjukkan bahwa isu kemiskinan tidak hanya dilihat dari kacamata ekonomi, tetapi juga dikaji dari aspek sosial budaya dan kesehatan masyarakat.

Perkembangan konsep kemiskinan yang tercermin dari beragam fokus jurnal tersebut sejalan dengan perubahan paradigma kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia dari masa ke masa. Pada era Orde Lama, pendekatan struktural yang menekankan pada pendistribusian aset dan nasionalisasi mendominasi upaya pengentasan kemiskinan. Beralih ke Orde Baru, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai kunci utama pengentasan kemiskinan dengan harapan terciptanya *trickle-down effect*. Memasuki era pasca-Orde Baru, pendekatan yang lebih multidimensional dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar mulai diadopsi.

Kehadiran jurnal internasional seperti *World Bank Economic Review* tidak hanya menunjukkan adanya diskursus global mengenai isu kemiskinan, tetapi juga membuka peluang untuk memperkuat pengaruh penelitian Indonesia di tingkat internasional. Publikasi di jurnal internasional berpotensi menarik perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga internasional, untuk bersama-sama mencari solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Penutup

Penelitian ini memetakan tren dan kontribusi riset global tentang kemiskinan dan kesejahteraan sosial, serta mengevaluasi posisi Indonesia dalam diskursus ilmiah internasional. Hasil analisis bibliometrik menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis dalam literatur internasional, tercermin dari jumlah sitasi yang tertinggi serta keterlibatan peneliti. Penulis dan publikasi terkemuka, seperti Suryahadi dan *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, telah memberikan sumbangsih yang signifikan dalam mengembangkan diskusi akademis di bidang ini. Pola tema utama seperti kemiskinan, kebijakan sosial, dan negara berkembang menunjukkan perhatian yang jelas pada isu terkait kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial yang melibatkan konteks Indonesia.

Studi ini juga mengamati ada peningkatan substansial dalam publikasi ilmiah sejak 2000-an, yang mencerminkan semakin mendalamnya perhatian terhadap masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, kolaborasi internasional juga menjadi faktor penting dalam mendorong penelitian yang memiliki dampak luas. Meskipun menunjukkan kemajuan, isu ketimpangan antarwilayah urban dan rural, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar tetap menjadi tantangan yang perlu diselesaikan.

Temuan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memimpin pengembangan model penanggulangan kemiskinan yang inovatif dan relevan dengan konteks negara berkembang. Untuk memaksimalkan peluang tersebut, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi lintas sektor sesuai dengan karakteristik kemiskinan yang multidimensi. Idealnya, upaya penanggulangan secara holistik melibatkan kolaborasi lintas-komisi di DPR RI, terutama antara Komisi VIII yang menangani isu sosial; Komisi VI terkait industri, perdagangan, dan UMKM; Komisi IX yang menangani bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan Komisi X terkait pendidikan. Sinergi antarkomisi ini krusial untuk mendorong arah kebijakan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Selain itu, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dipertimbangkan oleh DPR RI, yaitu memastikan bahwa kebijakan yang dirancang pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan menggunakan data akurat dan relevan, termasuk mempertimbangkan hasil-hasil penelitian yang ada. DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk melibatkan para peneliti serta institusi riset dalam merumuskan kebijakan yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan tersebut sebaiknya diarahkan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja di kawasan rural untuk mengurangi ketimpangan antara wilayah urban dan rural. DPR RI juga perlu mendorong penggunaan pendekatan berbasis pemberdayaan, seperti konsep “budaya tanding” untuk menumbuhkan kemandirian dan produktivitas masyarakat, serta penerapan kebijakan yang mendukung inklusi ekonomi, melalui pengembangan UMKM di daerah perdesaan dan urbanisasi berkelanjutan. Beberapa langkah strategis tersebut dapat diterapkan sebagai solusi untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi.

Dengan penerapan kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, DPR RI dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan SDGs, terutama penghapusan kemiskinan secara menyeluruh pada 2030. Dalam konteks tersebut, penelitian ini diharapkan menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam merancang langkah-langkah strategis yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aini, L. N., & Islamy, S. N. (2021). Dampak pengangguran, pendidikan, kesehatan, PDRB dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1(3), 132–141. <https://doi.org/10.53088/jerps.v1i3.325>
- Aji, W. T., & Legowo, M. I. (2024). Pancasila sebagai sistem etika politik dan etika pemerintahan di Indonesia. *Bhinneka: Jurnal Bintang Pendidikan dan Bahasa*, 2(4), 219–235. <https://doi.org/10.59024/bhinneka.v2i4.1030>
- Arifin, J. (2020). Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Sosio Informa*, 6(2), 114–132.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indikator kesejahteraan rakyat 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/06/3ef10d3d82ed93f616ba9113/indikator-kesejahteraan-rakyat-2024.html>
- Fadlail, A. (2024). Demokrasi Pancasila: Landasan nilai dan prinsipnya dalam membangun sistem dan etika politik Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(1), 403–413. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i1.3995>
- García-Gómez, C., Pérez, A., & Prieto-Alaiz, M. (2024). The risk of clustering of deprivations in Spain: A tale of two crises. *Applied Economic Analysis*. <https://doi.org/10.1108/AEA-03-2024-0113>
- García, V. H. B., Martínez, F. de M. G., Llamas Félix, B. I., & Esparza, R. M. V. (2024). Medición de la pobreza multidimensional en México mediante un análisis bibliométrico y de ecuaciones estructurales. *Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication*, 4(2), 1–23. <https://doi.org/10.47909/ijsmc.1354>
- Gasimova, N. (2024). Multiculturalism as the main philosophical doctrine of political and cultural development of modern society. *Metafizika Journal*, 7(2), 79–89. <https://doi.org/10.33864/2617-751X.2024.v7.i2.79-89>
- Han, S. (2023). Welfare regimes in Asia: convergent or divergent? *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 818. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02337-y>
- Hao, J., Dong, S., & Li, J. (2024). Estimating weight for multidimensional health poverty using Delphi method and analytic hierarchy process: A case of China. *BMC Public Health*, 24(1), 2908. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-20406-y>
- Hardiyati, M., Hasanah, A. W., & Rohman, N. (2023). Analisis kesejahteraan sosial sebagai disiplin ilmu. *ICODEV: Indonesian Community Development Journal*, 4(2), 89–94. <https://doi.org/10.24090/icodev.v4i2.9759>
- Hasrimi, M., Purwoko, A., Lubis, S. N., & Rujiman. (2024). Enhancing poor community welfare through evidence-based poverty alleviation programs in Serdang Bedagai Regency, North Sumatra, Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), 1–19. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2784>
- Huda, M. (2012). *Ilmu kesejahteraan sosial paradigma dan teori*. Penerbit Samudera Ilmu.
- Irawan, M. S., & Mailin, M. (2024). The role of the social welfare service in community empowerment in NA IX-X District, North Labuhanbatu Regency. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 5(1), 47–59. <https://doi.org/10.37680/amalee.v5i1.4300>
- Kementerian Sosial. (2019). *Rencana strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024*. Kementerian Sosial. <https://kemensos.go.id/unduh/laporan/recana-strategis-kementerian-sosial-tahun-2020-2024>
- Korde, Ž., Šuriņa, S., & Mārtinsone, K. (2023). Research trends in drama therapy: A bibliometric analysis based on Scopus. *Frontiers in Psychology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1327656>

- Maria Cati, M. (2024). Cultural and socio-economic contexts in policy design: Proposing theoretical insights on how psychoeconomics can inform the design of poverty alleviation policies. *International Journal of Psychiatry Research*, 7(5), 1–4. <https://doi.org/10.33425/2641-4317.1202>
- Maridjo, H., & Mudayen, Y. M. V. (2023). Affecting factors farmer welfare in Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 23(2), 79. <https://doi.org/10.20961/jiep.v23i2.60442>
- Munandar, A. (2020). Social policy in the global transformation flow: State responsibility for social welfare. *International Journal of Innovative Research and Development*, 9(2). <https://doi.org/10.24940/ijird/2020/v9/i2/FEB20026>
- Muslikhah, K., & Kurniawan, N. (2023). Implementasi konsep dan praktik filantropi Islam di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Thawalib*, 2(1), 47–58. <https://doi.org/10.54150/thame.v2i1.137>
- Nurjanah, F., Sakinah, M., & Muhammad, A. (2021). Chicken-and-egg dilemma between income and alms: Review of Islamic perspectives. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.20473/aijief.v4i1.23173>
- Passas, I. (2024). Bibliometric analysis: The main steps. *Encyclopedia*, 4(2), 1014–1025. <https://doi.org/10.3390/ENCYCLOPEDIA4020065>
- Pechdin, W., Sarnkhaowkhom, C., Kanthanetr, S., & Willemse, M. P. (2023). Retelling social inequalities in the era of market competition: Review and discussion for sustainable welfare development. *Frontiers in Sociology*, 8, 1–10. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1085278>
- Piran, F. W., & Mardjono, H. R. A. (2022). Upaya pemerintah dalam mengatasi pencegahan pengemis dari perspektif undang-undang kesejahteraan sosial. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 604–618. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.156>
- Pramu, S., & Hutajulu, D. M. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia tahun 1999–2020. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 3(2), 379–390. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v3i2.393>
- Pranadji, T. (2017). Penguatan kelembagaan gotong royong dalam perspektif sosio budaya bangsa: Suatu upaya revitalisasi adat istiadat dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 27(1), 61.
- Prasetyo, Y. E., Surtiari, G. A. K., & Nawawi. (2023). Unlocking the interaction of social restriction and social protection in Indonesia's COVID-19 policy: Future risk and adaptation. *Journal of Integrative Environmental Sciences*, 20(1). <https://doi.org/10.1080/1943815X.2023.2269223>
- Priadi, A., Sobri, M., Setyoko, P. I., & Putra, R. (2024). Model collaborative governance dalam penyediaan perumahan (Studi pada program rehabilitasi sosial rumah tak layak huni di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan). *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(1), 152–164. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i1.3064>
- Putra, D. F., Fahmi, A., Prasetyo, A., Firmansyah, F., & Ghozali, I. (2024). Pancasila sebagai dasar hukum dalam mewujudkan keadilan sosial. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(5), 233–237. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.412>
- Sari, N. D., Rahayu, N. D., Salimah, B. S., Firmansyah, N. M. H., & Khoiriawati, N. (2024). Strategi kebijakan publik melalui program pengentasan kemiskinan di era pemerintahan Jokowi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 3(2), 14–25. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i2.2112>
- Sari, R., & Solikah, M. (2024). Perempuan dan budaya kemiskinan penerima Program Keluarga Harapan. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 13(1), 71–84. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v13i1.64425>
- Setiawan, H. H. (2019). Merumuskan indeks kesejahteraan sosial (IKS) di Indonesia. *Sosio Informa*, 5(3), 208–222.

- Suresh, J. (2023). Poverty is lack of capabilities: A literature review. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 7(3), 462–476. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2023.7305>
- Syawie, M., & Sitepu, H. (2012). Kemiskinan dan kesejahteraan: Sebuah kajian konsep. *Sosio Informa*, 17(1), 29–35.
- Watif, M., Ramadhani, JT, A., Jumiati, Tahir, L. S. A., & Hikmah, N. (2024). Ketimpangan sosial dan kemiskinan pada masyarakat perkotaan. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(4), 536–547.
- Widodo, W., & Galang, T. (2019). *Poverty, evictions and development: Efforts to build social welfare through the concept of welfare state in Indonesia*. Proceedings of the 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019). <https://doi.org/10.2991/icgflow-19.2019.65>
- Wisdayanti, W., Hasan, H., & Nadjamuddin, L. (2023). Impact of multicultural based education learning in the process of social integration at SMA Al Azhar Mandiri Palu. *Journal of Education Method and Learning Strategy*, 2(01), 44–53. <https://doi.org/10.59653/jemls.v2i01.311>
- Wulandari, S., Dasopang, A. P., Rawani, G. A., Hasfizetty, I., Sofian, M. Y., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). Kebijakan anti kemiskinan program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3209–3218.
- Xu, D., Luo, D., He, X., Lin, T., & Wang, C. (2024). Intensity and determinants of rural migrant workers' multidimensional poverty in China. *Asian Journal of Social Science Studies*, 9(4), 1. <https://doi.org/10.20849/ajsss.v9i4.1449>
- Zulkarnain, Z., Ulinnuha, R., & Abdullah, R. (2024). Social inclusion as a challenge of multiculturalism in Germany: A study on muslim minorities. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 8(2), 135. <https://doi.org/10.31958/jsk.v8i2.12052>
- Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. *Organizational Research Methods*, 18(3), 429–472. <https://doi.org/10.1177/1094428114562629>